

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018-2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

MARI PATUN HASANAH

NIM 4320010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN 2018-2023

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

MARI PATUN HASANAH

NIM 4320010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mari Patun Hasanah
NIM : 4320010
Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal
sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Lampung Tahun
2018-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2024

Yang menyatakan,



MARI PATUN HASANAH

NIM. 4320010

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mari Patun Hasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Mari Patun Hasanah**
NIM : **4320010**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Lampung Tahun 2018-2023**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 Juni 2024
Pembimbing,


Qurrota A'yun, M.H.I
NIP. 1991033222020122020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Mari Patun Hasanah**
NIM : **4320010**
Judul : **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja
Modal sebagai Variabel Moderasi di Provinsi
Lampung tahun 2018-2023**
Dosen Pembimbing : **Qurrata 'Ayun, M.H.I**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA, CA
NIP. 198706302018012001

Penguji II

Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M. Ag.
NIP. 199303292020122026

Pekalongan, 15 Juli 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP: 197502201999032001

MOTTO

“Membuat target merupakan hal yang mudah, namun ikhtiar dan konsisten dalam mencapai target tersebut yang terkadang masih sulit direalisasikan sebab musuh terbesar ada pada diri sendiri”

(Ma'rifatun Hasanah)

“Tidak perlu menunggu sebuah kesempurnaan untuk memulai sebuah niat baik, mulailah dengan hal terkecil yang kita bisa dan sempurnakanlah setiap kekurangan yang ditemukan dalam perjalanannya”

(Sherly Annavita)

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga”

(Abdurrahman Wahid)

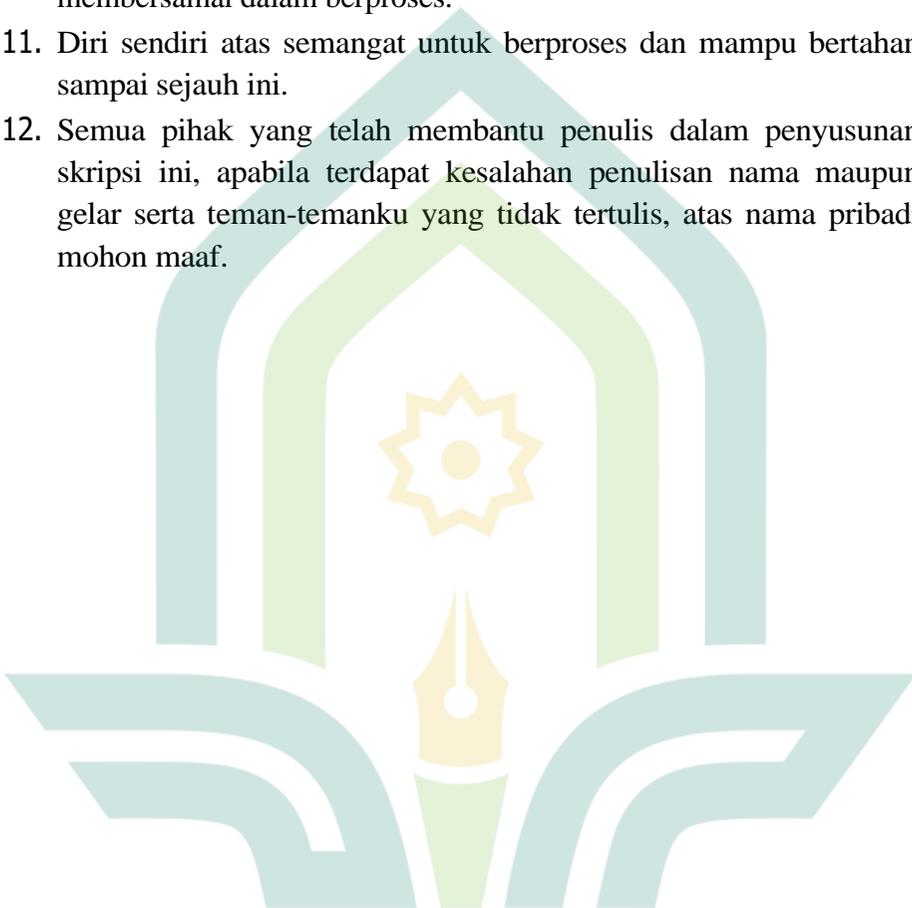
“Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat sehingga saya bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Bapak Karnoto dan Ibu Mutmainah, untuk setiap doa, perjuangan dan dukungannya selama ini. Semoga atas izin Allah saya tidak akan membiarkan semua itu sia-sia dan selalu berusaha memberikan yang terbaik.
2. Kedua adik saya, Nikmah dan Ufaira yang telah menemani hari-hariku sekaligus penyemangatku dan pelipur kejenuhanku.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Prof. Dr. Hj Shinta Dewi Rismawati S.H., M.H selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak Ade Gunawan M.M dan Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E.AK, MSA, CA selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan program studi Akuntansi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Ibu Qurrota A'yun, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritikan, masukan, nasihat dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Gunawan Aji, M.Si selaku dosen wali yang telah

- membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Sahabat-sahabatku terima kasih atas inspirasi, dorongan, semangat dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya.
 10. Teman-teman KKN Pepedan, rekan-rekan Aksya angkatan 2020, rekan organisasi HMJ Aksya, PMII dan Dustur Halal yang telah kebersamai dalam berproses.
 11. Diri sendiri atas semangat untuk berproses dan mampu bertahan sampai sejauh ini.
 12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, apabila terdapat kesalahan penulisan nama maupun gelar serta teman-temanku yang tidak tertulis, atas nama pribadi mohon maaf.



ABSTRAK

MARI PATUN HASANAH. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi di Provinsi Lampung tahun 2018-2023

Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya dilakukan untuk memanfaatkan potensi daerah melalui peningkatan pendapatan daerah. Untuk mengevaluasi akuntabilitas suatu organisasi/instansi dan pengelola dalam pelayanan publik yang lebih luas, pengukuran kinerja harus lebih dari sekedar memperlihatkan bahwa dana publik sudah digunakan dengan efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan adanya kinerja yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dimoderasi oleh Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) yang diolah dengan software Eviews versi 12. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter serta menggunakan teknik sampel jenuh sehingga diperoleh 90 sampel yang terdiri dari 2 Kota dan 13 Kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2018-2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa di moderasi alokasi belanja modal, rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel alokasi belanja modal tidak dapat memoderasi hubungan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Alokasi Belanja Modal

ABSTRACT

MARI PATUN HASANAH. The Effect of Regional Financial Performance on Economic Growth with Capital Expenditure Allocation as Moderator in Lampung Province in 2018-2023

The ability of local governments to improve their local economy is carried out to utilize regional potential through increased regional income. To evaluate the accountability of an organization / agency and manager in broader public services, performance measurement must be more than just showing that public funds have been used effectively and efficiently Economic growth can increase with good performance.

This research aims to determine the effect of financial performance on economic growth and is moderated by Capital Expenditure Allocation. This research is quantitative using moderated regression analysis (MRA) processed with Eviews software version 12. This study uses secondary data with data collection techniques using documentary methods and using saturated sample techniques so that 90 samples are obtained consisting of 2 cities and 13 districts in Lampung Province in 2018-2023.

The results of this study indicate that without moderation of capital expenditure allocation, the independence ratio has a positive and significant effect on economic growth. However, the effectiveness ratio and efficiency ratio have a negative and significant effect on economic growth. Meanwhile, the capital expenditure allocation variable cannot moderate the relationship between the independence ratio, the PAD effectiveness ratio and the efficiency ratio on economic growth.

Keywords: Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Capital Expenditure Allocation

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan Inayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi di Provinsi Lampung tahun 2018-2023”**.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan FEBI UIN K.H. bdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menyetujui penelitian.
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A., selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Gunawan Aji, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Ibu Qurrota A'yun, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta, Bapak Karnoto dan Ibu Mutmainah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi

kepada penulis serta adik penulis Nikmah Tussani dan Ufaira Nur Afifa yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat yang kusayangi terima kasih telah memberikan support dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi pihak lain yang memerlukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Juni 2024



Mari Patun Hasanah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori <i>Stewardship</i>	16
2. Teori <i>Fiscal Federalism</i>	16
3. Kinerja Keangan Daerah.....	17
4. Pertumbuhan Ekonomi	21

5. Alokasi Belanja Modal	22
B. Telaah Pustaka.....	23
C. Kerangka Berpikir	32
D. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Objek Penelitian	52
B. Hasil Analisis Data	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
D. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Keterbatasan Penelitian	73
C. Implikasi	74
D. Implikasi Praktis	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	I

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak agamanya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuktim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan, M.A, 2) Ali Audah 3) Prof. Gazali Dunai 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs.Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baik telah lama didambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab - Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fenom satu lambang".
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	ś	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وُ	fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

... ا ... يَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وَ	Hamzah dan wawu	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
-raudatulafāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda

syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Huruf hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn

وَأَوْفُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانِ

- Wa auf al-kaila wa-almizān

- Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhimajrehāwamursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - Inna

بِبَكَّةٍ مُّبَارَكًا

awwalabitinwuḍi'alinnāsillallaḥibakkatumubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila

fih al-Qur'ānu

- Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila

fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

- Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn

- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn

- Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

بِاللَّهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا - Lillāhi al-amrujamī'an

- Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāhabikullisyai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan PAD Kab/Kota di Provinsi Lampung	6
Tabel 1.2 Rincian Penggunaan APBD Lampung Tahun 2022	8
Tabel 1.3 Daftar Ruas Jalan	19
Tabel 2.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	20
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas PAD	21
Tabel 2.3 Kriteria Rasio Efisiensi	23
Tabel 3.1 Populasi kab dan kota di provinsi Lampung	37
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	39
Tabel 4. 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	52
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Lampung	54
Tabel 4.4 Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Lampung	55
Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Lampung	55
Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung	56
Tabel 4.7 Rasio Alokasi Belanja modal Kabupaten/Kota di Lampung	56
Tabel 4.8 Ketentuan Pemilihan Model	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman	58
Tabel 4.11 Lagrange Multiplier	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastitas	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Data Panel Common Effect Model (CEM)	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 4.16 Hasil Uji MRA	62

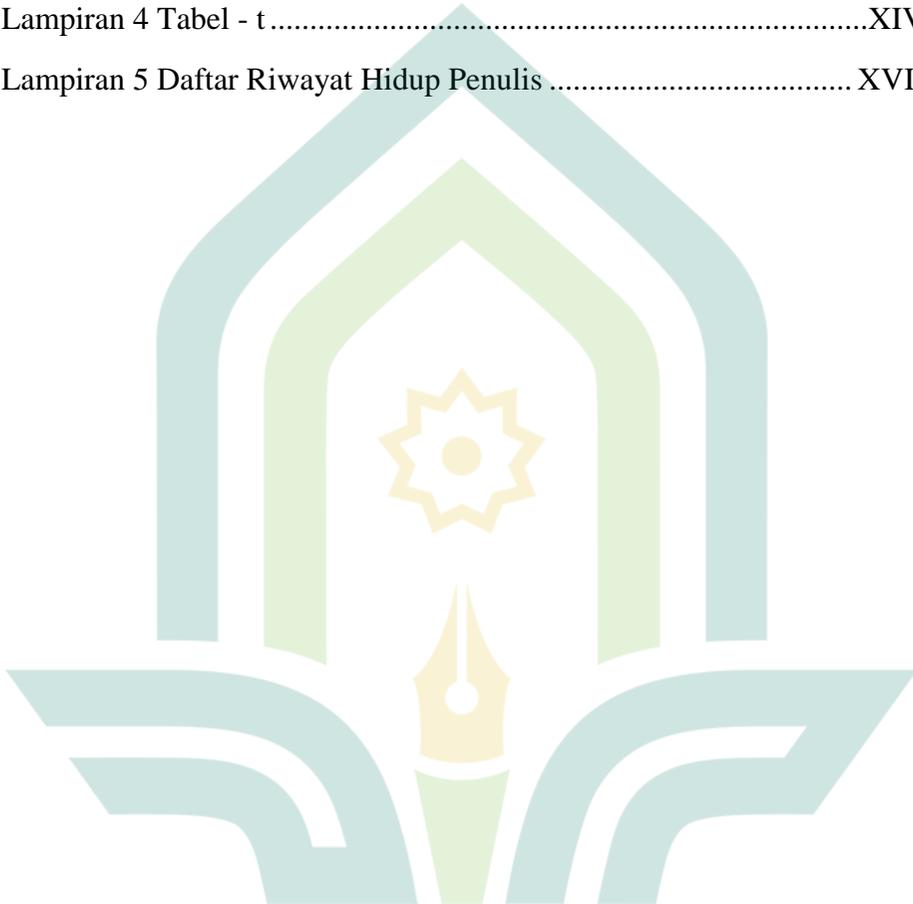
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-rata Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2018-2023	9
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Penelitian.....	I
Lampiran 2 Hasil Olah Data / Tabulasi Data Penelitian	V
Lampiran 3 Output Eviews	X
Lampiran 4 Tabel - t.....	XIV
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis	XVII

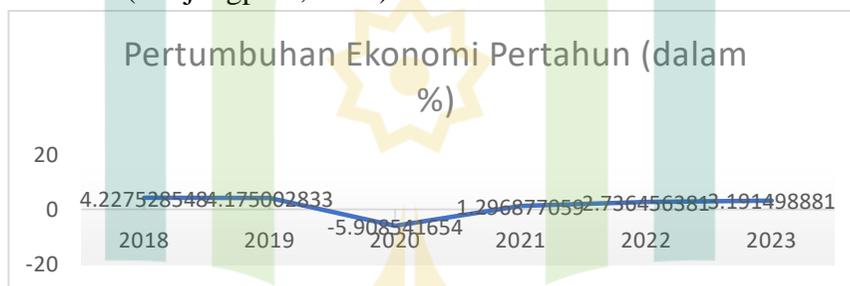


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan adanya kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi sangat penting guna memperoleh kesejahteraan rakyat suatu negara. Menurut Sukirno (2008:423) pertumbuhan ekonomi merupakan seberapa jauh aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Adanya kegiatan ekonomi yang semakin berkembang sehingga masyarakat memproduksi barang dan jasa secara kontinuitas dan ditandai dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang semakin meningkat pada suatu daerah dan kurun waktu tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi menjadi ciri-ciri pembangunan ekonomi. PDRB pertumbuhan ekonomi dan menjadi tolak ukur keberhasilan atau indikator dalam pembangunan ekonomi (Tanjungpura, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistisk, Provinsi Lampung, 2023, diolah

Di Provinsi Lampung, PDRB masing-masing pemerintah daerah menunjukkan peningkatan yang berbeda dari tahun 2018 hingga 2023. Menurut BPS pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung dalam rentan waktu 2018-2023 mengalami perubahan yang drastis dan tidak stabil. Pada tahun 2020 PDRB menurun mencapai -5,9 % dan kembali meningkat sedikit demi sedikit di tahun 2021 dan 2022. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan memainkan peran yang penting dalam meningkatkan PDRB suatu daerah.

Faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya adalah pengelolaan keuangan pemerintah

yang dilakukan dengan baik. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh adanya tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah disebut juga dengan kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi keuangan daerah. Peningkatan ekonomi daerah terjadi jika kinerja atau pengelolaan keuangan yang baik dan maksimal. Kinerja keuangan daerah merupakan perwujudan dari sebuah *output* kerja dalam ranah keuangan yaitu jumlah uang yang diterima dan dibelanjakan oleh pemerintah dengan menerapkan beberapa indikator dalam keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau undang-undang dalam periode penganggaran (Amin, 2015).

Adapun pengukuran terhadap kinerja merupakan suatu upaya guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi pekerjaan dan pelayanan pengelola. Hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam menetapkan tingkat pencapaian visi misi dan masyarakat bisa mengevaluasi pelayanan pemerintah apakah sebanding dengan dana yang dialokasikan untuk mereka (Ulum, 2012:20). Dengan kata lain, kinerja keuangan suatu wilayah dinilai baik apabila pengalokasiannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana suatu organisasi dapat mencapai hasil (*outcome*) yang maksimal sesuai dengan visinya.

Sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat disebut keuangan publik, terlepas dari apakah itu yang diatur oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran dan utang pemerintah dikenal sebagai “kebijakan fiskal”. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik (Rosidin, 2017).

Untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan memastikan kebutuhan dan kemakmuran generasi berikutnya, Islam menekankan bahwa keuangan publik harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mencapai kesejahteraan yang bersumber darinya (Farhadi Arifiansyah, dkk 2022). Kebijakan negara dalam mencapai aspek tujuan kesejahteraan publik maupun nonpublik haruslah berjalan seimbang. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, maka pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bisa makin naik. Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dari keberhasilan pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya dilakukan untuk memanfaatkan potensi daerah melalui peningkatan pendapatan daerah. Pengelolaan anggaran daerah adalah komponen penting yang perlu diatur dengan cermat, dan pemerintah harus memperhatikannya. Untuk mengevaluasi akuntabilitas suatu organisasi/instansi dan pengelola dalam pelayanan publik yang lebih luas, pengukuran kinerja harus lebih dari sekedar memperlihatkan bahwa dana publik sudah digunakan dengan efektif dan efisien (Muhajirin, 2019).

Dalam perspektif Islam, kinerja didefinisikan sebagai kesuksesan individu atau kelompok organisasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Seberapa jauh keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan tugas tersebut dikenal sebagai "level kinerja", dan orang yang mempunyai tingkat kinerja yang tinggi dianggap produktif, dan orang yang memiliki tingkat kinerja yang rendah dianggap tidak produktif atau berkinerja rendah. Allah SWT mendefinisikan kinerja sebagai tingkat keberhasilan. Allah berfirman mengenai kinerja dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut :

لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ أَعْمَاهُمْ وَيُؤْفِقُهُمْ ۖ عَمِلُوا مِمَّا دَرَجَتْ وَلِكُلِّ

Artinya : “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”

Menurut tafsir as-Sa'adi atau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi (pakar tafsir abad 14 H) menyebutkan bahwa "Dan bagi masing-masing mereka," dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, "derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan." Artinya, masing-masing berdasarkan derajatnya dalam kebaikan dan kejahatan, tempat mereka di akhirat adalah berdasarkan amalan mereka. Karena itulah Allah berfirman, "Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan." Keburukan mereka tidak ditambah sedikit pun dan kebaikan mereka tidak dikurangi sedikit pun.

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya Allah SWT akan memberikan pembalasan atas semua tindakan manusia, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa apabila orang melakukan sebuah tindakan atau perilaku dengan baik dalam bekerja dan memiliki kinerja yang baik untuk organisasinya, sehingga mereka nantinya menerima hasil yang sesuai dengan sesuatu yang dilakukannya dan memberi keuntungan bagi organisasi (Eni, 1967).

Kinerja keuangan suatu wilayah dinilai baik apabila pengalokasiannya dilakukan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Sejumlah rasio, termasuk rasio cakupan layanan departemen, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi, dan rasio kemandirian keuangan daerah, dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Namun, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi adalah fokus penelitian ini dalam pengujian pertumbuhan ekonomi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Adapun Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin

tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Sementara pengertian rasio Efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan dari total realiasi pengeluaran pemerintah (belanja daerah) dalam periode tertentu dengan realisasi penerimaan pendapatan.

Pengelolaan keuangan atau kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dengan bagaimana pemerintah dapat mengelolanya dengan baik salah satunya dengan pengalokasian belanja modal yang sesuai kebutuhan. Alokasi belanja modal bisa didefinisikan sebagai dana yang dimanfaatkan untuk membeli aset yang memiliki manfaat selama satu periode akuntansi bahkan lebih. Ketika biaya dipakai untuk meningkatkan aset milik pemerintah daerah, biaya tersebut dianggap sebagai belanja modal. (Hidayati, 2012). Belanja modal yang dimanfaatkan untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang nilainya relatif material untuk mendukung kegiatan pemerintah. Peralatan, tanah, gedung, mesin, jalan, irigasi, dan jaringan adalah beberapa aset tetap yang dipergunakan guna pengadaan aset tetap yang biasanya digunakan oleh pemerintah. Belanja modal dialokasikan sesuai kebutuhan infrastruktur daerah, seperti sarana dan prasarana umum, dan kemampuan pemerintah untuk beroperasi secara desentralisasi. Komponen dari belanja daerah atau belanja langsung disebut belanja modal. Penggunaan alokasi belanja modal yaitu guna mendukung pembangunan di daerah yang berkelanjutan dan pengadaan aset tetap. Anggaran yang tepat dialokasikan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, yang pada nantinya menghasilkan kesejahteraan masyarakat (Aditya, 2018).

Prinsip dasar pengelolaan menurut Ibnu Taimiyah adalah bahwa pendapatan masyarakat dan harus digunakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan Allah. Ketika uang masyarakat dibelanjakan, hal-hal yang paling penting harus diprioritaskan. Dalam konsep ekonomi Islam, Huda berpendapat bahwa penentuan skala prioritas dan pengeluaran negara harus sesuai dengan syari'iyah (Mubarok & Parmono,

2017). Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Hasyr (59):7 sebagai berikut.

...مِّنكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ ۙ ذُوْلَةَ يَكُوْنُ لَا كَفِي

Artinya : “...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya diantara kamu”.

Berdasarkan potongan ayat tersebut terdapat kata *daulah* yang bermakna pendistribusian harta dan terkait dengan petunjuk Allah SWT. bagaimana pengelolaan kekayaan untuk mencapai tata kelola sosial. Kekayaan (dalam hal ini anggaran) harus didistribusikan kepada semua kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan tersebut tidak boleh terbatas hanya dari golongan orang kaya saja. Artinya anggaran harus merata ke masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Anggaran pemerintah harus terealisasi dengan maksimal kepada masyarakat (Rijalul Fikri Et Al., 2018).

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merujuk pada anggaran keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Semua uang yang diterima dan dikeluarkan dicatat dan diawasi. Provinsi Lampung memiliki PAD kabupaten/kota berikut:

Tabel 1.1 Perolehan PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung

No.	Kab/Kota	PAD (dalam Miliar Rupiah)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Bandar Lampung	788,88	833,43	1.130,71	991,58	800	800
2.	Kota Metro	136,39	142,62	178,47	216,77	841,61	235,21
3.	Kab. Lampung Selatan	218,38	260,65	334,75	289,84	800	357,7
4.	Kab. Lampung Tengah	153,97	179,37	210,86	192,84	221,12	259,08
5.	Kab. Lampung Timur	153,97	139,35	153,32	329,23	220,46	211,4
6.	Kab. Lampung	45,15	58,16	65,73	69,54	73,66	65,65

	Barat						
7.	Kab. Lampung Utara	133,2 3	170,3 1	119,7 7	122,2	83,44	143,1 9
8.	Kab. Pesawaran	59,84	68,58	73,22	77,33	136,8 8	168,6 9
9.	Kab. Mesuji	41,03	38,9	47,21	50,66	56,95	65,47
10.	Kab. Pesisir Barat	28	30,17	41,77	61,09	76,94	97,39
11.	Kab. Pringsewu	82,53	88	118,3	128,0 1	132,6 1	128,7 7
12.	Kab. Tanggamus	83,87	91,93	117,8	131,1 7	128,0 1	104,6 6
13.	Kab. Tulang Bawang	103,0 1	97,32	102,3 8	110,9 7	135,6 6	137,6 9
14.	Kab. Tulang Bawang Barat	31,21	15,85	37,07	39,56	46,32	48,56
15.	Kab. Way Kanan	52,57	54,27	59,8	62,84	78,6	82,8
	Total	2112, 03	2268, 91	2791, 16	2873, 63	3832, 26	2906, 26

Sumber : djk.kemenkeu.go.id diolah 2024

Informasi yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang baik. Namun pada tahun 2023 penerimaan PAD cenderung menurun dari periode sebelumnya. Dalam Realisasi APBD Provinsi Se-Indonesia Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Lampung berada di peringkat ketiga. Salah satu fenomena yang terjadi di pemerintahan Provinsi Lampung adalah persentase efektif dan efisien pendapatan daerah Lampung dari tahun 2018 hingga 2022 yang rata-rata baik dalam hal penerimaan anggaran. Namun, banyak infrastruktur, seperti jalan yang rusak, yang belum diperbaiki, telah menuai kritik dan membuat presiden Jokowi juga berkunjung ke daerah tersebut. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dianalisis

dan dievaluasi guna mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan suatu daerah. Ini diperlukan karena hasil pengukuran ini dapat memberi pengelola keuangan daerah perspektif tambahan untuk meningkatkan kualitas keuangan mereka (Karlinda et al., 2021).

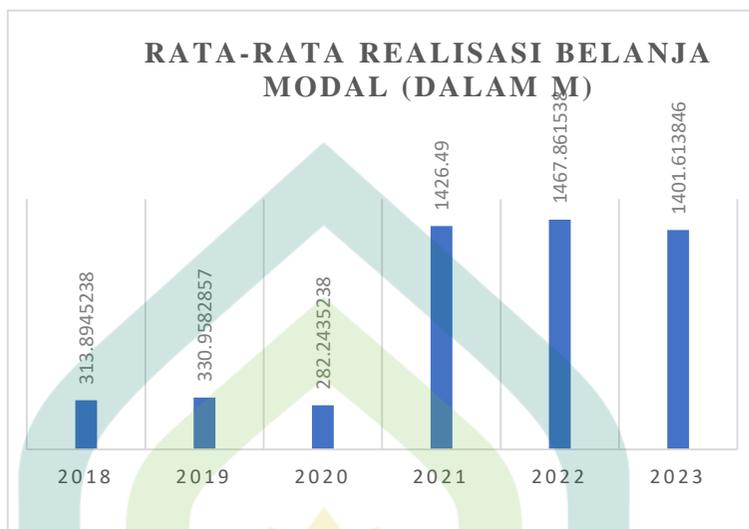
Dilansir juga dalam laman <https://news.republika.co.id/>, bahwa pada tahun 2022 realisasi dari belanja APBD Provinsi Lampung berada di peringkat ke-3 bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi se-Indonesia. Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD tahun 2022, yang ditetapkan pada 13 April 2022 bahwa di tahun 2022 belanja Provinsi Lampung mencapai 7 triliun rupiah. Berikut rincian penggunaan APBD Lampung tahun 2022.

Tabel 1.2 Rincian Penggunaan APBD Lampung Tahun 2022

Belanja Operasional 4,2 Triliun		Belanja Modal 1,46 triliun	
Biaya Pegawai	2 Triliun	Tanah	70 juta
Biaya Barang dan Jasa	1,66 Triliun	Peralatan dan mesin	180,29 miliar
Biaya Bunga	25,49 miliar	Gedung dan bangunan	282,33 miliar
Hibah	504,45 miliar	jalan, jaringan, dan irigasi	975,47 miliar
Bantuan Sosial	9,42 miliar	aset tetap lainnya	26,93 miliar
		modal aset tambahan	3,2 miliar

Berdasarkan rincian penggunaan APBD tahun 2022 di atas, maka dapat diketahui terdapat defisit anggaran dalam APBD senilai Rp 453,61 miliar dari total realisasi belanja APBD tersebut. Gubernur Lampung yaitu Bapak Arinal Djunaidi, mengakui bahwa infrastruktur jalan provinsi tersebut terus mengalami masalah dikarenakan anggaran yang kurang.

Gambar 1.1 Rata-rata Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2018-2023



Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id/> diolah, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari 2018 hingga 2023 mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya selama periode waktu tertentu. Pada tahun 2018 realisasi belanja modal 313.89 M dan pada tahun 2019 meningkat sedikit menjadi 330.95 M. Akan tetapi pada tahun 2020 hampir semua tiap wilayah mengalami penurunan karena Covid, belanja modal menurun hingga 282.24 M. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 1426.49. di tahun 2022 dan 2023 memperoleh 1467.86 dan 1401.81 di tahun 2023.

Dalam web resmi Pemprov Lampung <https://lampungprov.go.id/> menyebutkan bahwa Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bappeda provinsi Lampung tentang Capaian Kinerja provinsi Lampung 2018–2022, ada 1.693,273 km jalan yang berada di bawah kendali provinsi, terdiri dari 99 ruas jalan (16 korido), tersebar di 15 kabupaten/kota di seluruh provinsi, seperti yang ditunjukkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243.a/III.09/H/2016. Terkait dengan kemantapan jalan provinsi di

Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPMJ Provinsi Lampung, menetapkan target kemandirian jalan provinsi pada tahun 2022 sebesar 76% dengan target capaian akhir pada tahun 2022 sebesar 76,85%. Daftar jalan di Provinsi Lampung yang perlu diperbaiki dan sedang dalam proses perbaikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut (Pemprov Lampung, 2023) :

Tabel 1.3 Daftar Ruas Jalan

No.	Jalan	Kab/kota
1.	Ruas Simpang Sopyonyono – Serupa Indah	Kab. Way Kanan
2.	Ruas Simpang Trimulyono	Kab. Lampung Barat
3.	Kotabumi-Ketapang	Kab. Lampung Utara
4.	Ketapang Negara Ratu	Kab. Lampung Utara
5.	Negara Ratu-Simpang Sopyonyono	Kab. Lampung Utara
6.	Ruas Talang Padang- Ngarip	Kab. Tanggamus
7.	Ngarip-Ulusemong	Kab. Tanggamus-Kab. Lampung Barat
8.	Ulusemong-Simpang Trimulyono	Kab. Tanggamus
9.	Ruas Bujungtenuk-Penumangan	Kab. Tulangbawang
10.	Penumangan-Tegal Mukti	Kab. Tulang Bawang Barat
11.	Serupa Indah-Tajap	Kab. Way Kanan
12.	Ruas Kota Gajah-Simpang Randu	Kab. Lampung Tengah
13.	Simpang Randu-Seputih Surabaya	Kab. Lampung Tengah
14.	Seputih Surabaya-Sadewa	Kab. Lampung Tengah

Penelitian terdahulu oleh (Yulinah, 2017) menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi. Selain itu pada penelitian sebelumnya oleh Sukarmi & Budiasih (2016) menunjukkan bahwa alokasi belanja modal secara umum mendukung dan berpengaruh kuat dampak kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya, korelasi antaralokasi belanja modal dan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan. Menurut riset yang dilakukan oleh H. A. Siregar (2016), selama sepuluh tahun terakhir (2006-2015), Efektifitas keuangan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, namun tidak dengan kemandirian fiskal dan efisiensi keuangan. Selain itu, pada penelitian tersebut rasio alokasi belanja modal ini tidak dapat digunakan sebagai variabel moderasi alasannya yaitu pengaruh rasio belanja modal terhadap belanja daerah tidak memberikan pengaruh yang kuat hubungan antara kemandirian keuangan daerah, efisiensi PAD, dan efisiensi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Variabel alokasi belanja modal digunakan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini. Pemilihan variabel tersebut atas dasar hasil riset terdahulu oleh Linawati & Solikah (2019) menyebutkan kalau belanja modal bisa dijadikan sebagai pemoderator untuk variabel kinerja keuangan daerah. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu Sandri et al (2016) yang menghasilkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak dimoderasi oleh alokasi belanja modal. Penelitian ini mencoba meneliti secara nyata bahwa variabel alokasi belanja modal itu bisa memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Seperti yang dipaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, dalam penelitian ini, rasio kemandirian daerah, efisiensi keuangan, dan efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan *research gap* di atas membuktikan bahwa setiap variabel mempunyai pengaruh yang berbeda-beda dan itu menjadi suatu celah dan tidak ada konsistensi hasil temuan dalam penelitian. Oleh sebab hal itu, peneliti memiliki keetertarikan untuk melaksanakan pengkajian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, tentu saja dengan

penyesuaian yang ada. Berdasarkan paparan sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan terkait kinerja keuangan pemerintah Provinsi Lampung sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Lampung Tahun 2018-2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?
2. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung?
3. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?
4. Apakah belanja modal dapat memoderasi rasio kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?
5. Apakah belanja modal dapat memoderasi rasio efektivitas PAD hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?
6. Apakah belanja modal memoderasi rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung ?

C. Batasan Masalah

Berikut ini batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Mengingat banyaknya indikator dalam kinerja keuangan daerah, pada Hanya tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian fiskal, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan dalam penelitian ini.
2. Mengingat banyaknya indikator dalam pertumbuhan ekonomi, pada penelitian ini hanya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam pengukurannya.
3. Dalam riset ini rentan waktu yang diteliti yaitu tahun 2018-2023

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah provinsi Lampung.
4. Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi hubungan antara rasio kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.
5. Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi hubungan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.
6. Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi hubungan antara rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini semoga bisa menyumbangkan gagasan untuk perkembangan keilmuan mengenai beberapa hal yang dapat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi , kinerja keuangan daerah, dan belanja modal.
 - b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya tentang cara kerja pemerintah dalam kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta belanja modal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah

Dengan menggunakan sejumlah rasio yang bertujuan guna mengevaluasi hasil kinerja keuangan dari pemerintah daerah, diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya akan bisa memberikan gambaran dan pengetahuan tentang komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rasio-rasio ini akan berfungsi

sebagai alat yang dapat menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah berinteraksi satu sama lain. Diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan faktor-faktor ini sebagai acuan dan landasan untuk menentukan seberapa efektif mereka dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka

- b. Bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini bisa menambah rekognisi, pengetahuan, dan minat dalam menentukan karir bagi mahasiswa di bidang akuntansi sektor publik secara umum. Dapat dijadikan referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitian pada masa mendatang atau periode selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian penelitian yang terstruktur. Adapun penelitian ini terdiri dari 5 bab utama dengan sub-sub pembahasan yang menggambarkan keseluruhan proses dan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjabarkan berbagai hal yang melatarbelakangi penelitian mengenai kinerja keuangan daerah, bagaimana rumusan masalah yang hendak diselesaikan, tujuan diadakannya penelitian dan manfaat penulisan penelitian di ranah akuntansi sektor publik berfokus pada kinerja keuangan publik, serta sistematika pembahasan yang urut berdasarkan pedoman penulisan yang telah diberlakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian kinerja keuangan daerah dibahas dalam bab ini, baik *grand theory* maupun ide-ide untuk masing-masing variabel, dikutip dari berbagai sumber. Penjabaran ini dimulai dengan penjelasan tentang teori yang dipilih, tinjauan literatur yang digunakan untuk membandingkan pembaruan penelitian, kerangka berpikir yang menjelaskan jalan penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini memapaarkan dengan sistematis tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan data. Bab ini membahas jenis penelitian, metode, dan penggunaan setting penelitian. Selain itu juga membahas populasi dan sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian, serta variabel yang ditetapkan, yang masing-masing memiliki definisi operasional yang relevan. Bab ini juga membahas cara mendapatkan data dan menganalisisnya.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan topik penelitian, seperti pembuktian hipotesis dan rumusan masalah yang lengkap, serta hasil pengolahan data dan pembahasan, yang digambarkan dengan angka atau grafik.

BAB V PENUTUP

Ringkasan dari penelitian yang sudah dilaksanakan tentang kinerja keuangan daerah, memberikan masukan yang nantinya semoga berguna untuk evaluasi penelitian ini, dan menjelaskan keterbatasan penelitian yang menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang mengenai kinerja keuangan daerah di sajikan pada bab ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil uji dan pembahasan yang telah di paparkan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur oleh Rasio Kemandirian memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur oleh Rasio Efektivitas PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif dan signifikan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu wilayah yang diukur melalui Rasio Efisiensi berdampak negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur oleh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal tidak bisa memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur oleh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur oleh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Masih minim atau terbatasnya hasil riset terdahulu yang mendukung mengenai moderasi Alokasi Belanja Modal sehingga penulis mengalami sedikit kesulitan dalam menemukan rujukan dalam penelitian ini.
2. Hanya menggunakan sampel sebanyak 90 data yang berasal dari 13 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung rentan waktu 2018-2023. Dengan demikian diupayakan agar penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan lagi untuk meneliti Kab/Kota lain.

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini di ambil sebagian, maka dari itu diharapkan peneliti berikutnya menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi karena hasil Uji Koefisien determinasi pada *Adjusted R-squared* adalah 19,15% , dan 80,85% lainnya diperoleh dari variabel yang tidak dipakai dalam penelitian ini.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Mampu berkontribusi teoritis berupa wawasan ilmu pengetahuan baru yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Daerah khususnya diukur melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alokasi belanja modal sebagai variabel moderasi. Meskipun dalam penelitian ini tidak semua variabel berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi , namun dapat dapat diketahui setidaknya bahwa Kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan signifikan walaupun alokasi belanja modal tidak dapat memoderasi hubungan antarvariabel independen dan dependen.

D. Implikasi Praktis

Penelitian ini semoga dapat berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah agar dapat mengelola keuangan sesuai kebutuhan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya supaya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. F. (2018). Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. [http://eprints.ipdn.ac.id/9233/1/Mohammad Fitra Aditya_29.0819_Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kab. Grobogan Prov. Jateng .pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/9233/1/Mohammad_Fitra_Aditya_29.0819_Optimalisasi_Alokasi_Belanja_Modal_Dalam_Meningkatkan_Pembangunan_Infrastruktur_Daerah_Di_Kab._Grobogan_Prov._Jateng_.pdf)
- Adrian Furkani, Nurussyifa Nurussyifa, T. D. (2021). Pengaruh Besaran Dana Insentif Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah Dan Rasio Belanja Modal Terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Media Riset Akuntansi*.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna*, 80–91. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Anisya Ayu, Sri Rahayu, J. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. 25(9), 1032–1037.
- Annastasya, R. (2023). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala, M. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3427>
- Eni. (1967). kinerja keuangan daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, & Duta Bintang Fitriyah. (2022). *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam*

Perspektif Islam. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 1–14.
<https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219>

Figueiró, A. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sukabumi An. *Biogeografia*, 1, 5–24.

Gea, sri raharyu febriyanty. (2022). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Apbd Periode Tahun 2015-2020*.

Harahap, J. P. R., Daulay, M., & Torong, Z. B. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Siz. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
[s://doi.org/10.1](https://doi.org/10.1)

Hidayati, E. S. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se- Provinsi Lampung. *γ787*, 8.5.2017, 2003–2005.

Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir pada PT. PLN (persero) kota padang rayon kurangi. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>

Khodijah, S. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera

- Selatan. *Transcommunication*, 53(1), 1–8.
<http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1.
<https://doi.org/10.35794/jpekd.24818.20.2.2019>
- Lampung, D. K. P. (2023). *Pemprov Lampung Alokasikan Rp 750 Miliar pada APBD 2023 Untuk Perbaiki Jalan*. PemProv Lampung. <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-alokasikan-rp-750-miliar-pada-apbd-2023-untuk-perbaiki-jalan>
- Linawati, Mar'atus Solikah, B. Z. (2018). Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Kediri. *Majalah Ekonomi*, 23(1), 60–71.
- Linawati, L., & Solikah, M. (2019). Analisis Jalur Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v10i1.5789>
- Linawati, & Maratus. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 1–13.
- Linawati, & Suhardi. (2017). Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal. *Ekuivalensi*, 3(2), 19–28.
- Marlia, I. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Raden Intan Repository*, 1–55.

- Mubarok, A. I., & Parmono, A. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah An Lisis Kin Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Keua An In Er Dala M Pelaksanaan Otonomi Daerah M Pelaksanaan Otonomi Daerah Ksana Oton Da Di Kabupaten Bondowoso Pa N Bon Owos Tahu N 20 N 20 12 - 2016*.
- Muhajirin. (2019). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kawasan Swp Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Muhammad Aushaf Fernanda, Saiful Anwar, A. S. (2023). *Pengaruh Rasio Efektivitas, Efisiensi, Dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jawa Timur Muhammad. 1945(23)*.
- Ni Luh Nana Putri Ani, A. A. N. B. D. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. 3, 481–497*.
- Paramita, H. (N.D.). *Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kab/Kota Di Sumatera Utara*.
- Pasaribu, S. E., K, N. H., & Fadhilah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Daerah Sebagai Variabel Moderasi Kasus Kabupaten Labuhanbatu Utara) (Studi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4104/4115>

- Purnamawati, A. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Pstnt Batan Bandung. *Land Journal*, 1(2), 159–166. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.708>
- Putri, R. S. (2018). Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*.
- Raharjo, E. (2007). An accounting perspective. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- Rakadewa. (2022). *Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah 2.1*. 1–23.
- Rijalul Fikri, A. L., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 91–102. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.96>
- Rinova, R., & Dewi, F. G. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 1–17. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i2.192>
- Rosidin. (2017). *Mekanisme Qur ' ani Pengelolaan Keuangan Publik*.
- Rusli. (2014). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2021). Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26. [http://eprints.ipdn.ac.id/9233/1/Mohammad Fitra Aditya_29.0819_Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kab. Grobogan Prov. Jateng .pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/9233/1/Mohammad_Fitra_Aditya_29.0819_Optimalisasi_Alokasi_Belanja_Modal_Dalam_Meningkatkan_Pembangunan_Infrastruktur_Daerah_Di_Kab._Grobogan_Prov._Jateng_.pdf)

- Sandri, N. K., Ayu, I. G., Asri, M., Putri, D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 71–81.
- Siregar, H. A. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi*. 1(2), 218–236.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Sujarweni, W. (2017). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, 17, 54–66.
- Sukarmi, N. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). *Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. 3, 545–572.
- Sumarjo, H. (2010). *No Title*.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tanjungpura, U. (2022). *Pengaruh Hasil Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten Bengkayang)*. 502–512.
- Tiara, ferani inggrid. (2016). Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di. *Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya*.
- Utami, N. R. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di*

Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.
http://eprints.unpak.ac.id/5787/1/2022_Nurul_Rizqia_Utami_022118143.pdf

- Wijayanto, R. (2017). *Belanja modal*.
- Wulandari, S. (2017). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Efisiensi Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat*.
- Wulandari, S. (2018). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan*, 1–79.
- Yulinah, S. (2017). *Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
[s://doi.org/10.1](http://doi.org/10.1)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mari Patun Hasanah
NIM : 4320010
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : maripatunhsh@gmail.com
No. Hp : 085700633209

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

PENGARUH FINER-JA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN

EKONOMI DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2024



(Mari Patun Hasanah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD